

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Analisis kepentingan antar aktor dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan melihat peran masing-masing aktor yang saling berinteraksi dan berkonflik dalam mengatasi bencana banjir. Hasil penelitian menemukan bahwa peran aktor berbeda-beda dilihat dari kepentingan dan sistem dari aktor di dalam penanggulangan bencana. Di dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 3 kategori berdasarkan kepentingan dan pengaruh/kekuasaan: stakeholder utama, pendukung dan masyarakat. Pada pengelolaan bencana banjir di Kota Medan setiap aktor melakukan kerjasama dan koordinasi akan tetapi pada implementasinya terdapat kendala dalam perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh setiap aktor. Kepentingan utama pemerintah hanya berfokus pada kebijakan dan regulasi sedangkan LSM berfokus pada pemberdayaan komunitas dan peningkatan kapasitas lokal. Penanggulangan bencana banjir di Kota Medan memiliki beberapa kendala meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya informasi yang akurat serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program mitigasi masih kurang. Dalam Pelaksanaan pengelolaan bencana banjir di Kota Medan tidak ada kebijakan yang dirumuskan secara inclusive dan deliberatif oleh pemerintah dalam pengelolaan bencana, baik sebelum, saat dan setelah bencana.

Dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Medan, terdapat implikasi saling silang kepentingan dengan melihat kepentingan yang saling bertemu dan kepentingan yang tidak saling bertemu di antara aktor-aktor yang ada dan terlibat. Pemerintah, BPBD dan Masyarakat memiliki kepentingan yang saling bertemu

dalam penanggulangan bencana banjir, yaitu dalam meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan dari masyarakat di Kota Medan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya dan membuat kebijakan sedangkan masyarakat memiliki kepentingan langsung dalam hal keselamatan dan kesejahtraannya. Kepentingan ini bertemu melalui upaya pemerintah untuk memberikan bantuan dan dukungan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana. Dalam hal membantu korban bencana banjir, pemerintah, BPBD, Komunitas Labosude, PMI, Basarnas, ojek online serta masyarakat bekerjasama dan berkoordinasi dalam membantu korban bencana banjir. Semua stakeholder yang terlibat ini memberikan bantuan berupa barang maupun informasi untuk menyelamatkan dan mengawasi korban. Dalam kepentingan yang saling bertolak belakang adalah antara Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Deli Tua, dengan adanya terjadi perbedaan dan konflik kepentingan terkait drainase diantara kedua wilayah tersebut. Terjadi permasalahan pembangunan drainase dan kesulitannya berkoordinasi sejak ditetapkannya daerah otonom dengan perbedaan pendekatan, alokasi anggaran dan prioritas. Kemudian partisipasi dan koordinasi semua aktor yang terlibat dalam pengelolaan bencana banjir masih kurang untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil dan pembahasan analisis kepentingan antar aktor dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan, maka terdapat saran diberikan.

Dalam koordinasi antar stakeholder perlu ditingkatkan komunikasi sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran untuk membantu penanggulangan bencana banjir. Masyarakat perlu diberikan edukasi untuk memanfaatkan teknologi dalam efektivitas penanggulangan bencana banjir dan meningkatkan kapasitas pemerintah serta masyarakat untuk menghadapi bencana banjir dengan cara meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan sumber daya dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanggulangan bencana banjir. Dalam kolaborasi diperlukan inovasi yang diciptakan oleh seluruh stakeholder yang ikut serta dalam pengelolaan bencana banjir di Kota Medan agar tidak terjadinya perbedaan kepentingan antar stakeholder. Pelaksanaan dalam pengelolaan bencana Perlu adanya kebijakan yang dirumuskan secara inclusive dan deliberatif oleh pemerintah yang melibatkan pemangku kepentingan yang ikut dalam pengelolaan bencana baik sebelum, saat dan setelah bencana.

Diperlukan keterlibatan dan pemahaman dari setiap aktor terutama masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan bencana di Kota Medan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana banjir di Kota Medan diperlukan peningkatan sistem informasi yang lebih baik, peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan mekanisme kolaborasi antar aktor.